

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata Menurut Para Ahli

Pariwisata merupakan fenomena sosial kompleks yang melibatkan pergerakan manusia, aktivitas ekonomi, serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat destinasi. *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) mendefinisikan pariwisata sebagai pergerakan orang yang melakukan perjalanan ke tempat di luar lingkungan biasanya untuk waktu kurang dari satu tahun, dengan tujuan utama bukan untuk bekerja pada aktivitas yang dibayar dari tempat yang dikunjungi. Definisi tersebut menekankan pada tiga elemen fundamental yakni adanya perjalanan, durasi tinggal sementara, serta motivasi non-ekonomi dari pelaku perjalanan.

Pandangan para ahli memberikan pandangan yang beragam namun saling melengkapi dalam memahami konsep pariwisata. Definisi pariwisata mencakup keseluruhan aktivitas yang terkait dengan perjalanan rekreasi, termasuk penyediaan layanan akomodasi, transportasi, makanan dan minuman, serta fasilitas pendukung lainnya yang dikelola secara profesional. Tuti menekankan bahwa pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan sementara waktu dari tempat tinggal asal ke destinasi lain

dengan motivasi non-ekonomi, seperti keinginan untuk bersenang-senang, mencari pengalaman baru, atau memenuhi rasa ingin tahu.²⁴

Definisi yang lebih menyeluruh dikemukakan oleh Cooper dan Hall yang memandang pariwisata sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen utama yakni wisatawan sebagai subjek pelaku perjalanan, elemen geografis yang mencakup daerah asal, daerah transit, dan daerah tujuan, serta sektor industri pariwisata yang menyediakan berbagai layanan untuk memfasilitasi perjalanan tersebut. Pendekatan sistem ini penting karena menempatkan pariwisata tidak sekadar sebagai kumpulan aktivitas terpisah tetapi sebagai suatu kesatuan yang saling terkait.²⁵

Regulasi di Indonesia memberikan landasan hukum yang jelas mengenai kepariwisataan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang kemudian mengalami perubahan ketiga pada tahun 2025. Undang-undang tersebut mendefinisikan pariwisata sebagai berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.²⁶ Pergeseran paradigma dalam regulasi terbaru menempatkan pariwisata tidak hanya sebagai sektor ekonomi tetapi juga

²⁴ Tuti Lestari Zandroto dkk., “Analisis Kinerja Pegawai Dinas Pariwisata dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Pantai Somi di Kecamatan Gido Kabupaten Nias,” *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 3148–56, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1615>.

²⁵ Chris Cooper dan C. Michael Hall, “The geopolitics and challenges of current issues in tourism,” *Current Issues in Tourism* 27, no. 1 (2024): 1–6, <https://doi.org/10.1080/13683500.2024.2304114>.

²⁶ Dapot Chandra dkk., “Penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Di Desa Air Sempiang, Kabupaten Kepahiang,” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882* 2, no. 1 (2024): 698–706, <https://doi.org/10.62379/2hxxpf44>.

sebagai instrumen peradaban, pembangunan manusia, kebudayaan, dan penguatan identitas bangsa.

2. Pariwisata Syariah

Pariwisata syariah merupakan konsep penyelenggaraan kegiatan wisata yang dilaksanakan dengan dukungan fasilitas, pelayanan, serta pengelolaan yang melibatkan masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Konsep ini tidak hanya berfokus pada penyediaan destinasi yang ramah bagi wisatawan Muslim, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai etika, moral, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas pariwisata.²⁷ Dengan demikian, pariwisata syariah bertujuan menciptakan pengalaman wisata yang memberikan manfaat secara spiritual, sosial, ekonomi, dan lingkungan tanpa mengabaikan kebutuhan wisatawan dari berbagai latar belakang.

Wisata syariah dapat diartikan sebagai proses penggabungan nilai-nilai keislaman ke dalam seluruh aspek kegiatan wisata. Di dalam Al-Qur'an Allah SWT menyuarakan pada umatnya untuk melakukan perjalanan atau travelling hal ini bertujuan agar umatnya selalu senantiasa bersyukur atas kelimpahan rezeki di bumi. Di dalam Al-Qur'an ada sembilan (9) ayat yang membahas tentang perjalanan salah satunya terdapat pada surah Ar-Rum:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

²⁷ Popon Srisusilawati and Sartika Nurhasanah, "Mewujudkan Indonesia Emas 2045: Peran Pariwisata Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Ajaran Islam," *Jurnal Al-Qiyam* 6, no. 1 (2025): 179–91.

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik.”

Dalam implementasinya, pariwisata syariah memiliki sejumlah kriteria yang menjadi pedoman agar seluruh aktivitas wisata tetap selaras dengan nilai-nilai Islam, yaitu sebagai berikut:²⁸

- a. Berorientasi pada kemaslahatan umum, yakni memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun kesejahteraan bersama.
- b. Mengutamakan unsur pencerahan, penyegaran, dan ketenangan, sehingga kegiatan wisata tidak hanya menjadi sarana rekreasi, tetapi juga mampu memberikan ketenangan batin, menambah wawasan, serta memperkuat nilai-nilai spiritual.
- c. Menghindari segala bentuk kemusyrikan dan khurafat, yaitu tidak menyediakan maupun mendukung aktivitas yang bertentangan dengan ajaran tauhid atau mengandung unsur kepercayaan yang menyimpang dari syariat Islam.
- d. Menjauhi segala bentuk kemaksiatan, seperti perzinahan, pornografi, pornoaksi, konsumsi minuman keras, penyalahgunaan narkoba, perjudian, maupun aktivitas lain yang bertentangan dengan norma agama dan moral.

²⁸ Dr. Furqan, *Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan*, ed. Difa Ramadhanti (DKI Jakarta: Bukuloka Literasi Bangsa, 2025).

- e. Menjunjung tinggi etika, akhlak, dan nilai-nilai kemanusiaan, dengan menghindari perilaku hedonis, tindakan asusila, serta aktivitas yang dapat merusak martabat manusia.
- f. Menjamin amanah, keamanan, dan kenyamanan bagi seluruh wisatawan melalui pelayanan yang profesional, jujur, bertanggung jawab, serta didukung lingkungan wisata yang aman dan kondusif.
- g. Bersifat universal dan inklusif, artinya pariwisata syariah dapat dinikmati oleh seluruh wisatawan tanpa membedakan agama, suku, ras, maupun latar belakang budaya, selama tetap menghormati ketentuan yang berlaku di destinasi wisata.
- h. Menjaga kelestarian lingkungan, melalui pengelolaan destinasi wisata yang berkelanjutan, pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, serta upaya pelestarian ekosistem sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ciptaan Allah SWT.
- i. Menghormati nilai-nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal, dengan tetap melestarikan tradisi masyarakat setempat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga tercipta harmoni antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal.

3. Tujuan dan Fungsi Pariwisata

Pariwisata memiliki tujuan dan fungsi yang bersifat multidimensi, mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Tujuan penyelenggaraan pariwisata sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kepariwisataan meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi,

peningkatan kesejahteraan rakyat, pengurangan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, pelestarian alam dan budaya, promosi budaya bangsa, serta penguatan identitas bangsa.²⁹

Secara lebih spesifik, fungsi pariwisata dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Fungsi ekonomi pariwisata tercermin dari kemampuannya menghasilkan devisa negara, menciptakan lapangan kerja, mendorong investasi di daerah tujuan wisata, serta meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Fungsi sosial-budaya pariwisata diwujudkan melalui perannya sebagai sarana pelestarian budaya lokal, media pertukaran antar budaya, serta wahana peningkatan rasa bangga masyarakat terhadap identitas budayanya. Fungsi lingkungan pariwisata terkait dengan upaya konservasi sumber daya alam dan peningkatan kualitas lingkungan di destinasi wisata. Fungsi politik pariwisata tercermin dari perannya sebagai instrumen diplomasi dan promosi citra positif bangsa di mata internasional.³⁰

Pitana dan Gayatri menambahkan bahwa pariwisata memiliki fungsi strategis sebagai sektor pengungkit (*multiplier effect*) terhadap sektor-sektor lain seperti pertanian, perikanan, kerajinan tangan, transportasi, dan jasa keuangan. Efek pengganda ini terjadi karena aktivitas pariwisata membutuhkan berbagai macam barang dan jasa yang diproduksi oleh

²⁹ Chandra dkk., “Penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Di Desa Air Sempiang, Kabupaten Kepahiang.”

³⁰ Nabila Fairuuz dkk., “Peranan Jumlah Wisatawan Asing, Nilai Tukar, dan PMDN dalam Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Devisa Pariwisata Indonesia,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 4 (2022): 469189, <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i4.570>.

sektor-sektor tersebut.³¹ Fungsi pengungkit pariwisata dalam penelitian ini menjadi sangat relevan karena pedagang di destinasi wisata merupakan salah satu kelompok yang paling langsung merasakan dampak ekonomi dari aktivitas pariwisata.

4. Jenis-Jenis Pariwisata

Tipologi pariwisata dapat dibedakan berdasarkan berbagai kriteria seperti motivasi perjalanan, jumlah wisatawan, durasi tinggal, serta aktivitas yang dilakukan. Motivasi perjalanan menjadi dasar pengelompokan pariwisata ke dalam beberapa jenis, yaitu pariwisata rekreatif yang bertujuan untuk bersenang-senang dan melepas penat, pariwisata kultural yang berfokus pada pengalaman budaya dan sejarah, pariwisata alam yang berkaitan dengan aktivitas di lingkungan alami, serta pariwisata MICE (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*) yang bersifat bisnis.³²

UNWTO mengklasifikasikan pariwisata ke dalam tiga kategori utama yakni *domestic tourism* yang melibatkan wisatawan dalam negeri bepergian di dalam wilayah negaranya sendiri, *inbound tourism* yang melibatkan wisatawan mancanegara yang datang ke suatu negara, serta *outbound tourism* yang melibatkan wisatawan domestik yang bepergian ke

³¹ Herlina Trismeilinda Prabawati dkk., “Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Surabaya Dalam Pengembangan Potensi Wisata Heritage: Studi Di Kampung Heritage Lawang Seketeng,” *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (e- ISSN: 2797-0469) 2, no. 03 (2022): 15–22, Indonesia.

³² Sintia dan Nurhayati, “Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Daya Saing Destinasi Lokal.”

luar negeri.³³ Klasifikasi ini penting untuk memahami pola pergerakan wisatawan serta implikasinya terhadap perekonomian destinasi.

Perkembangan pariwisata melahirkan berbagai bentuk pariwisata alternatif sebagai respons terhadap dampak negatif pariwisata massal. Pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*), ekowisata (*ecotourism*), pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*), serta pariwisata pedesaan (*rural tourism*) menjadi model yang semakin populer karena menekankan pada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Model-model pariwisata alternatif tersebut relevan dengan fokus penelitian yang mengkaji strategi pengelolaan wisata berkelanjutan.³⁴

5. Unsur-Unsur Pariwisata

Pariwisata sebagai suatu sistem terdiri atas beberapa unsur yang saling berinteraksi dan membentuk satu kesatuan fungsional. Josua mengidentifikasi enam unsur pokok pariwisata yang dikenal dengan istilah "6A" yaitu *Attraction* (daya tarik wisata), *Accessibility* (aksesibilitas), *Amenities* (fasilitas pendukung), *Ancillary services* (layanan tambahan seperti biro perjalanan dan asuransi), *Accommodation* (akomodasi), serta *Awareness* (kesadaran masyarakat terhadap pariwisata).³⁵

³³ Muhammad Rahmad dan Azkia Exsantia Putri, "Pariwisata Domestik Sebagai Penyelamat Industri: Strategi Dan Implementasi Di Indonesia," *DESTINASI: Jurnal Ilmiah Pariwisata & Hospitality* 1, no. 01 (2026): 168–77.

³⁴ Sana, "Strategi Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan untuk Mengurangi Dampak Lingkungan di Destinasi Wisata Alam Indonesia."

³⁵ Josua May Rio Putra Pakpahan dan John Sihar Manurung, "Pengaruh Daya Tarik, Fasilitas Dan Harga Tiket Terhadap Kepuasan Pengunjung Objek Wisata Bukit Holbung Di Kabupaten Samosir," *Jurnal Riset Manajemen* 2, no. 2 (2024): 45–53, <https://doi.org/10.54066/jurma.v2i2.1701>.

Daya tarik wisata merupakan unsur utama yang menjadi motivasi wisatawan untuk berkunjung. Daya tarik ini dapat berupa atraksi alam seperti pantai, gunung, dan air terjun; atraksi budaya seperti upacara adat, tarian tradisional, dan situs sejarah; atau atraksi buatan seperti taman rekreasi dan pusat perbelanjaan. Tanpa adanya daya tarik yang memadai, suatu daerah tidak akan mampu mengundang kedatangan wisatawan.

Aksesibilitas mencakup ketersediaan sarana transportasi dan kemudahan mencapai destinasi wisata. Faktor ini sangat menentukan kenyamanan wisatawan serta biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai lokasi. Fasilitas pendukung atau *amenities* meliputi restoran, toko souvenir, tempat ibadah, pusat informasi wisata, dan fasilitas kesehatan. Kelengkapan fasilitas ini akan meningkatkan kepuasan wisatawan dan memperpanjang durasi tinggal mereka di destinasi.

Akomodasi seperti hotel, villa, losmen, dan *homestay* berfungsi menyediakan tempat menginap bagi wisatawan yang berkunjung lebih dari satu hari. Layanan tambahan meliputi biro perjalanan wisata, pemandu wisata, serta layanan asuransi perjalanan. Unsur terakhir adalah kesadaran masyarakat yang mencerminkan sikap dan perilaku masyarakat lokal terhadap pariwisata dan wisatawan.

6. Peran Pariwisata dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat

Pariwisata memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi wisata namun keterbatasan sumber daya lain untuk dikembangkan. Peran ini

diwujudkan melalui beberapa mekanisme yang saling terkait. Pertama, pariwisata menciptakan lapangan kerja baik secara langsung di industri pariwisata seperti hotel, restoran, dan biro perjalanan maupun secara tidak langsung di sektor-sektor pemasok seperti pertanian, perikanan, dan industri kerajinan.³⁶

Kedua, pariwisata meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai peluang usaha yang muncul seiring dengan berkembangnya destinasi wisata. Masyarakat lokal dapat berperan sebagai penyedia akomodasi, penyedia makanan dan minuman, penjual suvenir, pemandu wisata, penyedia jasa transportasi, serta berbagai bentuk usaha informal lainnya. Keberagaman peluang ini memungkinkan partisipasi masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi.

Ketiga, pariwisata mendorong pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pembangunan jalan, listrik, air bersih, dan fasilitas telekomunikasi yang diperlukan untuk mendukung pariwisata pada akhirnya juga dapat dinikmati oleh masyarakat lokal. Kondisi tersebut meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan. Keempat, pariwisata menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui efek pengganda pendapatan (*income multiplier effect*). Setiap rupiah yang dibelanjakan wisatawan akan berputar di dalam perekonomian lokal karena

³⁶ Sintia dan Nurhayati, "Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Daya Saing Destinasi Lokal."

dibelanjakan kembali oleh pihak yang menerima pendapatan dari pariwisata. Semakin panjang rantai pengeluaran ini di dalam perekonomian lokal, semakin besar manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat.³⁷

Studi kasus di Desa Mejono, Kediri menunjukkan bagaimana pariwisata mampu mengubah wajah perekonomian masyarakat. Destinasi wisata Gronjong Wariti yang dikembangkan dari sungai kumuh berhasil menyerap sekitar 60 tenaga kerja dan menyediakan 45 lapak bagi pedagang kaki lima yang semuanya berasal dari warga lokal. Omzet pedagang dapat mencapai Rp300 ribu pada hari sepi dan lebih dari Rp1 juta pada hari libur atau momen tertentu. Contoh tersebut memperkuat argumen tentang peran strategis pariwisata dalam pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan.³⁸

7. Dampak Positif dan Negatif Pariwisata

Pariwisata sebagai aktivitas yang melibatkan interaksi intensif antara wisatawan, masyarakat lokal, dan lingkungan menimbulkan dampak yang bersifat dialektis. Dampak tersebut mencakup sisi positif yang menjadi tujuan pengembangan pariwisata, sekaligus sisi negatif dapat muncul apabila pengelolaannya tidak dilakukan secara bijaksana. Dampak positif pariwisata terutama terlihat pada aspek ekonomi berupa peningkatan pendapatan masyarakat, penyediaan lapangan kerja, pertumbuhan usaha kecil dan menengah, serta peningkatan pendapatan asli daerah. Aspek

³⁷ Zulfi dan Asriati, "Kontribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Nasional Dalam Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan."

³⁸ Santi Wulan Purnami dkk., "Pengelolaan Sampah sebagai Kompos di Wisata Gronjong Wariti Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dengan Media Bata Terawang," *Sewagati* 7, no. 3 (2023): 361–69, <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i3.501>.

sosial budaya menunjukkan bahwa pariwisata dapat memperkuat kebanggaan masyarakat terhadap budayanya sendiri, mendorong pelestarian warisan budaya, serta memperluas wawasan masyarakat terhadap dunia luar. Aspek lingkungan menunjukkan bahwa pariwisata mampu mendorong upaya konservasi sumber daya alam dan perbaikan kualitas lingkungan di destinasi wisata.³⁹

Dampak negatif pariwisata perlu mendapat perhatian serius karena dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Aspek ekonomi menunjukkan bahwa pariwisata dapat menyebabkan ketergantungan yang berlebihan pada sektor wisata sehingga ketika terjadi krisis seperti pandemi COVID-19, masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada pariwisata mengalami dampak yang sangat berat. Kebocoran ekonomi juga terjadi ketika sebagian besar pendapatan pariwisata mengalir kepada pihak luar daerah. Aspek sosial budaya menunjukkan bahwa pariwisata dapat memicu komersialisasi budaya, yaitu ketika tradisi dan upacara adat direduksi menjadi sekadar tontonan bagi wisatawan. Pergeseran nilai-nilai lokal serta meningkatnya kesenjangan ekonomi antara masyarakat yang terlibat dan tidak terlibat dalam sektor pariwisata turut menjadi permasalahan yang serius.⁴⁰

³⁹ Sana, "Strategi Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan untuk Mengurangi Dampak Lingkungan di Destinasi Wisata Alam Indonesia."

⁴⁰ Sana, "Strategi Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan untuk Mengurangi Dampak Lingkungan di Destinasi Wisata Alam Indonesia."

Dampak lingkungan negatif pariwisata meliputi pencemaran air dan udara, kerusakan ekosistem akibat pembangunan fasilitas wisata yang tidak terkendali, serta peningkatan volume sampah yang tidak dikelola dengan baik. Masalah *overtourism* atau kelebihan wisatawan di destinasi tertentu juga menyebabkan degradasi kualitas lingkungan dan pengalaman wisata itu sendiri.

8. Pariwisata sebagai Sektor Penggerak Ekonomi Lokal

Pariwisata memiliki karakteristik khusus yang menjadikannya sebagai sektor strategis dalam menggerakkan perekonomian lokal. Sektor pariwisata berbeda dengan sektor ekstraktif yang cenderung menguras sumber daya alam karena pariwisata dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan apabila dikelola dengan baik. Karakteristik lain dari pariwisata terlihat pada kemampuannya dalam mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain, sebab setiap kunjungan wisatawan akan meningkatkan permintaan terhadap berbagai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat lokal.⁴¹

Konsep ekonomi lokal yang digerakkan oleh pariwisata didasarkan pada pemahaman bahwa pengeluaran wisatawan akan menjadi pendapatan bagi pelaku usaha lokal yang selanjutnya dibelanjakan kembali untuk membeli barang dan jasa dari pelaku ekonomi lokal lainnya. Proses perputaran uang ini menciptakan efek berganda yang meningkatkan total

⁴¹ Zulfi dan Asriati, "Kontribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Nasional Dalam Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan."

pendapatan masyarakat lebih besar dari pengeluaran awal wisatawan. Semakin banyak pengeluaran wisatawan yang ditangkap oleh perekonomian lokal, semakin besar efek pengganda yang dihasilkan.

Hasil studi empiris menunjukkan bahwa kontribusi pariwisata terhadap perekonomian lokal memiliki pengaruh yang signifikan. Penelitian di kawasan wisata Pura Luhur Uluwatu membuktikan bahwa modal usaha dan jam kerja berpengaruh positif terhadap pendapatan pedagang. Besarnya modal usaha yang dimiliki serta lamanya jam kerja yang dijalankan pedagang dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas pariwisata.⁴²

Pembangunan pariwisata juga mendorong pertumbuhan kewirausahaan di kalangan masyarakat lokal. Melihat peluang ekonomi yang terbuka, masyarakat tergerak untuk membuka berbagai jenis usaha yang melayani kebutuhan wisatawan. Proses ini tidak hanya meningkatkan pendapatan tetapi juga membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Desa wisata Batu Katak di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser menjadi contoh bagaimana pariwisata mendorong masyarakat terutama kelompok perempuan untuk mengembangkan usaha kuliner berbahan baku lokal serta memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran.

⁴² Gagih Pradini dkk., “Perkembangan Objek Wisata Pura Uluwatu Bali,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 19 (2023): 885–89, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10034393>.

B. Pengelolaan Wisata

1. Pengelolaan Wisata dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Pengelolaan wisata dalam perspektif ekonomi syariah merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengembangan destinasi wisata yang berlandaskan nilai-nilai Islam dengan tujuan menciptakan kemaslahatan (*maslahah*) bagi seluruh pemangku kepentingan. Pengelolaan tersebut tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.⁴³ Dalam ekonomi syariah, kegiatan wisata dipandang sebagai aktivitas yang diperbolehkan (*mubah*) selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, seperti menghindari unsur riba, *gharar*, *maisir*, kemaksiatan, serta menyediakan fasilitas dan pelayanan yang halal. Dengan demikian, pengelolaan wisata syariah harus mampu menyeimbangkan antara tujuan ekonomi, sosial, dan spiritual sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat sekitar.⁴⁴

Dalam perspektif ekonomi syariah, pengelolaan wisata tidak hanya diukur dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan atau pendapatan destinasi, tetapi juga dari sejauh mana pengelolaan tersebut mampu mewujudkan nilai-nilai *Maqashid Syariah*, yaitu menjaga agama (*hifz ad-*

⁴³ Nuhbatul Basyariah, "Konsep Pariwisata Halal : Perspektif Ekonomi Islam," *Yout & Islamic Economic Journal* 02, no. 01 (2021): 1–6.

⁴⁴ Muh. Baihaqi et al., *Ekonomi & Pariwisata Syariah* (Mataram: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram, 2020).

din), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).⁴⁵ Oleh karena itu, setiap kebijakan pengelolaan destinasi wisata harus diarahkan pada perlindungan terhadap lingkungan, penyediaan fasilitas ibadah yang memadai, penyediaan makanan dan minuman halal, menjaga norma kesopanan, serta menciptakan aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat secara adil kepada masyarakat lokal. Penerapan prinsip maqashid menjadikan pengelolaan wisata tidak sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Lebih lanjut, teori pengelolaan wisata dalam ekonomi syariah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengembangan destinasi wisata melalui konsep pemberdayaan (*empowerment*). Masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan, pengelolaan, hingga evaluasi destinasi sehingga manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati oleh investor atau pemerintah, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat sekitar melalui peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan berkembangnya usaha mikro. Prinsip tersebut sejalan dengan nilai keadilan (*'adl*), kerja sama (*ta'awun*), serta tanggung jawab sosial (*mas'uliyah*) yang menjadi fondasi ekonomi Islam.⁴⁶ Dengan adanya partisipasi masyarakat,

⁴⁵ Aulia Urrohmah, Taufiqur Rahman, and Mohmammad Nizarul Alim, "Pemberdayaan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Desa Berbasis Desa Wisata Perspektif Maqashid Syariah : Studi Destinasi Wisata Lon Malang Madura," *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 7 (2024): 269–78.

⁴⁶ Madnasir Madnasir et al., "Mengungkap Potensi Wisata Syariah Berbasis Ekonomi Lokal : Katalisator Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Provinsi Lampung (Revealing the Potential of Local Economy-Based Sharia Tourism : A Catalyst for the Economic Revival of Coastal Communities)," *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen (JAKMAN)* 5, no. 4 (2024): 553–63.

keberlanjutan destinasi wisata akan lebih mudah diwujudkan karena masyarakat memiliki rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap objek wisata yang dikelola.

Selain itu, pengelolaan wisata dalam perspektif ekonomi syariah menekankan pentingnya keberlanjutan (*sustainability*). Pengelolaan destinasi harus menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Islam memandang manusia sebagai khalifah di bumi yang memiliki amanah untuk menjaga kelestarian alam dan menghindari kerusakan (*fasad*).⁴⁷ Oleh karena itu, aktivitas pengelolaan wisata harus memperhatikan kebersihan lingkungan, konservasi sumber daya alam, penggunaan fasilitas yang ramah lingkungan, serta pengelolaan sampah secara bertanggung jawab. Pendekatan tersebut menjadikan wisata syariah selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang saat ini banyak diterapkan dalam pengelolaan destinasi wisata modern.

2. Aspek-Aspek Wisata Berkelanjutan

Pengelolaan dalam konteks organisasi dan bisnis didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif

⁴⁷ Alis Warosatul Hasanah, Wawan Kurniawan, and Agung Apriana, "Analisis Pengembangan Wisata Syariah Sebagai Daya Tarik Wisatawan Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Al-Amar (JAA)* 5, no. 1 (2024): 7–12.

dan efisien. Terry dan Rue menekankan bahwa pengelolaan bukan sekadar serangkaian aktivitas teknis, melainkan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal.⁴⁸

Pengelolaan wisata dalam bidang kepariwisataan diartikan sebagai proses sistematis dalam mengintegrasikan berbagai komponen pariwisata, mulai dari atraksi, aksesibilitas, fasilitas, hingga layanan pendukung guna menciptakan pengalaman wisata yang memuaskan serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Ruang lingkup pengelolaan wisata mencakup pengaturan arus kunjungan wisatawan, pengembangan produk wisata, pengelolaan sumber daya alam dan budaya, serta pengembangan kapasitas masyarakat lokal.

Inskeep memberikan definisi yang lebih komprehensif dengan menyatakan bahwa pengelolaan pariwisata adalah proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan dan pengoperasian pariwisata di suatu destinasi. Proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat lokal, dan wisatawan itu sendiri. Keberhasilan pengelolaan pariwisata diukur dari kemampuannya menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.⁴⁹

⁴⁸ Ai Deudeu Maria Dewi dan Yosep Farhan Dafik Sahal, "The Perspective of Islamic Education Management Is Seen from The Management of George R. Terry," *An-Nuha: Jurnal Sosial & Humaniora* 3, no. 1 (2025): 1–16, <https://doi.org/10.63005/annuha.v3i1.1>.

⁴⁹ Lufita Sari dkk., "Analisis Pengembangan Objek Wisata Pantai Bone Di Desa Malalanda Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara," *JAGAT (Jurnal Geografi Aplikasi Dan Teknologi)* 9, no. 2 (2025): 117–27.

3. Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Wisata tentang Perencanaan, asian, Pelaksanaan, dan Evaluasi untuk Keberlanjutan dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Pengelolaan destinasi wisata tidak lagi semata-mata bertumpu pada keindahan alam atau atraksi budaya, melainkan pada kualitas sistem manajemen yang menggerakkan seluruh sumber daya menuju tujuan bersama. Pendekatan yang komprehensif dan terstruktur menjadi keharusan mengingat wisata merupakan industri lintas sektor yang melibatkan beragam pemangku kepentingan dengan kepentingan yang seringkali tidak seragam. Teori fungsi manajemen yang dikemukakan oleh Henri Fayol yang mencakup perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan/pelaksanaan (*directing*), dan pengendalian/evaluasi (*controlling*) menyediakan landasan teoritis yang kokoh untuk menganalisis sekaligus mengoptimalkan pengelolaan wisata.⁵⁰

Keempat fungsi ini tidak bersifat linear semata, melainkan siklikal dan saling mempengaruhi, sehingga integrasinya secara utuh menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya wisata berkelanjutan yang berdampak positif terhadap pendapatan pedagang lokal, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Pembahasan berikut akan meleburkan konsep perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi wisata ke dalam kerangka empat fungsi manajemen Fayol, dengan tambahan analisis kritis

⁵⁰ Febrian Humaidi Sukmana dan Sri Maryanti, "Teori Administrasi Henri Fayol: Gagasan, Kontribusi, Dan Batasannya," *Politea: Jurnal Politik Islam* 6, no. 2 (2023): 44–66, <https://doi.org/10.20414/politea.v6i2.8544>.

mengenai keterkaitan sistemik antar fungsi serta implikasinya terhadap pemberdayaan ekonomi lokal dan koordinasi stakeholder.⁵¹

Pertama, fungsi perencanaan (*planning*) dalam pengelolaan wisata menjadi dasar utama dalam menentukan arah pengembangan destinasi wisata. Perencanaan dilakukan dengan mengidentifikasi potensi wisata, menganalisis daya dukung lingkungan, memperkirakan jumlah kunjungan wisatawan, serta menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang secara terukur. Pengelolaan wisata yang baik harus memperhatikan prinsip keberlanjutan agar pengembangan wisata tidak merusak lingkungan dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Pembagian kawasan wisata ke dalam zona konservasi, zona pemanfaatan terbatas, dan zona pelayanan wisata diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.⁵²

Perencanaan wisata yang berbasis fungsi manajemen Fayol juga harus memuat indikator keberhasilan yang jelas, seperti tingkat kepuasan pengunjung, peningkatan pendapatan pedagang, serta bertambahnya retribusi daerah. Penataan ruang usaha pedagang, penyediaan akses permodalan, dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu dirancang sejak awal agar manfaat wisata dapat dirasakan secara merata. Perencanaan yang tidak matang sering menyebabkan pengelolaan wisata

⁵¹ Yusri A. Boko, "Perkembangan Teori Manajemen (Teori Ilmiah Dan Teori Organisasi Klasik)," *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi (JUPEK)* 3, no. 2 (2022): 49–61, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6972610>.

⁵² Sukmana dan Maryanti, "Teori Administrasi Henri Fayol."

berjalan tidak terarah, menimbulkan konflik kepentingan, dan menciptakan ketimpangan ekonomi di kawasan wisata.⁵³

Kedua, fungsi pengorganisasian (*organizing*) berkaitan dengan pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam pengelolaan wisata. Struktur pengelola wisata harus dibentuk secara jelas agar setiap pihak memahami perannya masing-masing. Pengelolaan dapat dilakukan melalui pemerintah daerah, BUMDes, koperasi, maupun kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Sistem koordinasi antar *stakeholder* sangat penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, terutama dalam pengelolaan ruang usaha pedagang dan pelayanan wisata.⁵⁴

Pihak yang terlibat dalam pengelolaan wisata meliputi pemerintah pusat maupun daerah, masyarakat lokal, tokoh adat, pemuda, pelaku usaha formal seperti hotel dan restoran, serta pedagang sektor informal. Pembagian kerja yang jelas dan rantai komando yang teratur menjadi bagian penting dalam fungsi pengorganisasian menurut teori Fayol. Pengelolaan wisata juga memerlukan unit kerja khusus yang menangani pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pengembangan UMKM wisata atau forum pedagang kawasan wisata.

Fungsi pengorganisasian tidak hanya berfokus pada pembentukan struktur kerja, tetapi juga mencakup penyediaan akses permodalan, pelatihan teknis dan manajerial bagi pedagang, serta penyebaran informasi

⁵³ Sana, "Strategi Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan untuk Mengurangi Dampak Lingkungan di Destinasi Wisata Alam Indonesia."

⁵⁴ Boko, "Perkembangan Teori Manajemen (Teori Ilmiah Dan Teori Organisasi Klasik)."

wisata secara merata. Informasi mengenai jadwal kunjungan, kegiatan wisata, dan peluang kerja sama usaha harus dapat diakses oleh seluruh pelaku usaha di kawasan wisata. Pengorganisasian yang baik mampu menciptakan pelayanan wisata yang lebih tertata karena setiap pihak memiliki tanggung jawab yang jelas dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan wisatawan. Permasalahan dalam pengorganisasian sering terjadi ketika tidak ada pihak yang bertanggung jawab secara khusus terhadap pelayanan wisata, sehingga kualitas destinasi menurun dan berdampak langsung pada pendapatan pedagang. Pengorganisasian yang efektif dapat menciptakan sistem kerja yang lebih terkoordinasi, meningkatkan kualitas pelayanan wisata, serta membangun lingkungan usaha yang lebih inklusif bagi masyarakat lokal.

Ketiga, fungsi pengarahan atau pelaksanaan (*directing*) berperan dalam menjalankan rencana dan struktur organisasi menjadi kegiatan nyata di lapangan. Tahap ini menjadi bagian penting dalam pengelolaan wisata karena seluruh perencanaan diterapkan secara langsung melalui aktivitas operasional sehari-hari. Pelaksanaan wisata mencakup pelayanan tiket, pengaturan arus pengunjung, pembukaan dan penutupan kawasan wisata, penyediaan fasilitas kebersihan, keamanan, serta pelayanan informasi bagi wisatawan. Kepemimpinan pengelola sangat memengaruhi efektivitas kerja tim, kedisiplinan petugas, motivasi pedagang, dan kualitas pelayanan wisata. Komunikasi yang baik antara pengelola dan seluruh pelaku wisata

juga diperlukan agar standar pelayanan, etika lingkungan, dan prosedur penanganan darurat dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten.⁵⁵

Pelaksanaan yang baik bagi pedagang terlihat dari tersedianya ruang usaha yang tertata, akses yang mudah dijangkau wisatawan, penerapan harga yang wajar, serta adanya penyelesaian masalah yang cepat apabila terjadi persaingan tidak sehat antar pedagang. Program pemberdayaan juga menjadi bagian penting dalam fungsi pelaksanaan, seperti pelatihan keramahan pelayanan, kebersihan produk, pengemasan, dan penggunaan sistem pembayaran digital. Keberhasilan pelaksanaan tidak hanya bergantung pada perencanaan dan pengorganisasian, tetapi juga dipengaruhi oleh disiplin petugas, sistem pengawasan, dan dukungan terhadap kinerja pengelola wisata. Pelaksanaan sering menjadi titik lemah dalam pengelolaan wisata ketika pengawasan tidak berjalan dengan baik atau petugas kurang bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Kondisi pelayanan wisata yang kurang baik akan berdampak langsung pada pedagang karena wisatawan cenderung enggan berbelanja apabila kawasan wisata terlihat kotor atau petugas bersikap tidak ramah. Pengarahan yang efektif harus dilakukan melalui kepemimpinan yang mampu memberikan motivasi, membangun kerja sama, dan memberdayakan seluruh pelaku wisata. Pengelola wisata juga harus mampu menyesuaikan pelayanan dengan kondisi musim kunjungan wisatawan,

⁵⁵ Dewi dan Sahal, "The Perspective of Islamic Education Management Is Seen from The Management of George R. Terry."

seperti menambah tenaga kebersihan, memperpanjang jam operasional, atau menyediakan posko pengaduan saat libur panjang. Penyesuaian tersebut diperlukan agar kualitas pelayanan tetap terjaga dan pendapatan pedagang tidak menurun akibat kurangnya kesiapan operasional pengelola wisata.⁵⁶

Keempat, fungsi pengendalian atau evaluasi (*controlling*) berperan dalam memastikan seluruh kegiatan pengelolaan wisata berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan kondisi di lapangan serta perbaikan terhadap berbagai kendala yang ditemukan selama kegiatan wisata berlangsung. Proses ini mencakup pengawasan terhadap jumlah kunjungan wisatawan, pendapatan wisata, retribusi daerah, tingkat kepuasan pengunjung, dan kepuasan pedagang terhadap fasilitas maupun akses usaha yang tersedia. Pengendalian yang baik membantu pengelola mengetahui tingkat keberhasilan pengelolaan wisata sekaligus menentukan langkah perbaikan yang diperlukan.⁵⁷

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kebijakan pengelolaan wisata, seperti penataan ruang usaha pedagang, penambahan akses permodalan, penyesuaian jam operasional, dan pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar aturan. Pengendalian juga dilakukan terhadap kondisi lingkungan melalui pemantauan kapasitas sampah, kebersihan kawasan, dan kondisi fasilitas wisata. Pembatasan jumlah pengunjung dapat diterapkan apabila kondisi lingkungan mulai

⁵⁶ Sukmana dan Maryanti, "Teori Administrasi Henri Fayol."

⁵⁷ Sana, "Strategi Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan untuk Mengurangi Dampak Lingkungan di Destinasi Wisata Alam Indonesia."

melebihi daya dukung kawasan wisata. Evaluasi yang dilakukan secara rutin membantu menjaga kualitas pelayanan dan keberlanjutan destinasi wisata.

Keempat fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, saling berkaitan dalam pengelolaan wisata. Perencanaan yang baik tidak akan berjalan tanpa pengorganisasian yang jelas. Pengorganisasian yang baik juga membutuhkan pelaksanaan yang disiplin dan pengendalian yang konsisten. Ketidakseimbangan antar fungsi manajemen dapat memengaruhi kesejahteraan pedagang lokal. Perencanaan yang kurang tepat dapat menyebabkan pedagang berada di lokasi yang kurang strategis. Pengorganisasian yang lemah dapat menghambat akses permodalan dan pelatihan. Pelaksanaan yang tidak maksimal dapat menurunkan kenyamanan wisatawan, sedangkan evaluasi yang tidak berjalan membuat berbagai keluhan pedagang tidak mendapatkan solusi.⁵⁸

Kualitas pengelolaan wisata memiliki hubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat lokal, terutama pedagang mikro dan kecil. Koordinasi antar stakeholder menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan wisata. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, masyarakat sebagai pelaku utama wisata, dan pelaku usaha sebagai mitra dalam pengembangan destinasi wisata. Kerja sama antar pihak diperlukan untuk membahas pengembangan wisata, kondisi pedagang, akses permodalan, kapasitas ruang usaha, serta dampak lingkungan.

⁵⁸ Sintia dan Nurhayati, "Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Daya Saing Destinasi Lokal."

Pengelolaan wisata yang terintegrasi mampu menciptakan pelayanan yang baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga keberlanjutan lingkungan wisata.

4. Strategi Pengelolaan Wisata Berbasis *Stakeholder*

Strategi pengelolaan wisata berbasis *stakeholder* menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan destinasi tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik atau aspek teknis kawasan wisata. Destinasi wisata merupakan ruang yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara kolaboratif dan berkelanjutan. Strategi pengelolaan wisata perlu memperhatikan hubungan antar *stakeholder* dalam setiap proses pengembangan, mulai dari pemasaran wisata, pengembangan produk, hingga pengelolaan sumber daya. Teori *Stakeholder* yang dikembangkan oleh R. Edward Freeman menjelaskan bahwa keberhasilan suatu pengelolaan tidak hanya diukur dari pencapaian internal, tetapi juga dari kemampuan dalam mengakomodasi dan menyeimbangkan kepentingan seluruh pihak yang terlibat.⁵⁹

Pemerintah, masyarakat lokal, pedagang, pelaku usaha wisata, pengelola destinasi, wisatawan, investor, organisasi masyarakat, dan lembaga pariwisata memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan wisata. Keterlibatan seluruh *stakeholder* diperlukan agar pengelolaan wisata dapat berjalan secara adil, berkelanjutan, dan mampu

⁵⁹ Annisa Try Lestari, “Kontribusi Pentahelix Sebagai Stakeholder Dalam Penyebarluasan Informasi Desa Wisata Melung” (other, Universitas Amikom Purwokerto, 2023), <https://doi.org/10/LAMPIRAN.pdf>.

memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, terutama pedagang kecil.⁶⁰

Pengelolaan wisata yang tidak melibatkan *stakeholder* secara menyeluruh berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, ketimpangan manfaat ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Strategi pengelolaan wisata berbasis *stakeholder* menekankan pentingnya partisipasi dan koordinasi dalam setiap proses pengembangan destinasi, mulai dari pemasaran, pengembangan produk wisata, hingga pengelolaan sumber daya. Kerja sama antar *stakeholder* membantu menciptakan pengelolaan wisata yang lebih terarah dan mampu mendukung kesejahteraan pedagang serta keberlanjutan destinasi wisata.

Pertama, Strategi pemasaran wisata dalam perspektif *stakeholder* dilakukan melalui keterlibatan seluruh pihak yang berhubungan dengan aktivitas wisata. Pemerintah berperan sebagai fasilitator kebijakan dengan menciptakan dukungan bagi promosi wisata, seperti pemberian insentif kepada pelaku usaha yang ikut mempromosikan destinasi wisata. Masyarakat lokal dan komunitas sekitar memiliki peran penting dalam membangun citra destinasi melalui interaksi langsung dengan wisatawan. Pedagang juga menjadi bagian penting dalam pemasaran wisata karena keramahan pelayanan dan kualitas produk yang mereka jual dapat membentuk pengalaman positif bagi wisatawan. Pengalaman tersebut sering

⁶⁰ Muzakky, "Peran Pengelolaan Objek Wisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam."

mendorong wisatawan melakukan promosi secara tidak langsung melalui rekomendasi pribadi maupun media sosial.⁶¹

Pengelola destinasi bertugas mengoordinasikan kegiatan promosi agar berjalan secara terarah dan tidak menimbulkan tumpang tindih antar pihak. Dukungan investor, organisasi masyarakat, dan lembaga pariwisata diperlukan untuk membantu pendanaan promosi, penelitian pasar, dan evaluasi strategi pemasaran. Kurangnya koordinasi antar *stakeholder* dapat menyebabkan perbedaan antara promosi wisata dan kondisi nyata di lapangan sehingga menurunkan kepuasan wisatawan. Kolaborasi pemasaran yang baik mampu memperluas distribusi manfaat ekonomi karena wisatawan tidak hanya terpusat pada satu usaha, tetapi juga menjangkau pedagang kecil di kawasan wisata.⁶²

Kedua, Strategi pengembangan produk wisata harus melibatkan masyarakat lokal sebagai pihak utama dalam proses pengembangan wisata. Produk wisata yang berkelanjutan umumnya berasal dari budaya, tradisi, dan kehidupan masyarakat setempat. Keterlibatan masyarakat penting agar pengembangan produk tetap menjaga identitas budaya dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi. Pedagang turut mendukung pengembangan produk melalui inovasi kuliner, kerajinan, dan jasa yang mencerminkan ciri khas daerah wisata. Pelaku usaha wisata dapat membantu meningkatkan kualitas produk melalui pelatihan pelayanan,

⁶¹ Safitri, "Peran Pengembangan Objek Wisata Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat."

⁶² Lestari, "Kontribusi Pentahelix Sebagai Stakeholder Dalam Penyebarluasan Informasi Desa Wisata Melung."

pengemasan, dan kebersihan produk tanpa menghilangkan nilai keaslian budaya lokal.⁶³

Pengelola wisata memiliki peran dalam memfasilitasi komunikasi antara masyarakat, pedagang, dan pelaku usaha untuk menentukan arah pengembangan produk wisata. Investor dan organisasi masyarakat dapat mendukung pendanaan serta pengembangan fasilitas wisata. Lembaga kebudayaan dan lembaga pariwisata juga perlu dilibatkan untuk memastikan pengembangan produk wisata tetap menghormati nilai budaya lokal. Wisatawan turut memengaruhi pengembangan produk melalui kritik, saran, dan preferensi terhadap atraksi wisata. Pengembangan produk yang tidak melibatkan masyarakat lokal sering menghasilkan produk wisata yang kurang otentik dan sulit bertahan dalam jangka panjang.⁶⁴

Ketiga, Strategi manajemen sumber daya dilakukan melalui kerja sama antar *stakeholder* dalam mengelola sumber daya alam, manusia, dan finansial. Sumber daya alam seperti pantai, sungai, hutan, dan keanekaragaman hayati merupakan aset utama wisata yang harus dijaga keberlanjutannya. Pemerintah berperan dalam membuat regulasi dan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Masyarakat lokal turut menjaga lingkungan melalui kegiatan konservasi dan pengawasan kawasan wisata. Pedagang dan pelaku usaha wisata juga perlu terlibat dalam pengelolaan sampah, penghematan air, dan penggunaan energi ramah

⁶³ Sintia dan Nurhayati, “Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Daya Saing Destinasi Lokal.”

⁶⁴ Zulfi dan Asriati, “Kontribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Nasional Dalam Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan.”

lingkungan karena aktivitas wisata dapat menghasilkan limbah yang cukup besar.⁶⁵

Pengelola destinasi bertugas menyusun sistem pengelolaan lingkungan yang mendorong perilaku ramah lingkungan bagi pelaku usaha wisata. Organisasi masyarakat dan komunitas lokal dapat mendukung pelestarian lingkungan melalui kegiatan kebersihan kawasan dan penghijauan. Investor perlu mematuhi standar lingkungan dalam pembangunan fasilitas wisata agar tidak merusak ekosistem. Lembaga lingkungan dan institusi penelitian dapat membantu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap keberlanjutan pengelolaan wisata.

Pengelolaan sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan keterampilan, sertifikasi kompetensi, dan penyediaan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Pengelolaan sumber daya finansial dapat dilakukan melalui pembiayaan bersama, pemanfaatan retribusi wisata, dan dukungan tanggung jawab sosial perusahaan. Konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya sering terjadi akibat perbedaan kepentingan antar stakeholder, terutama terkait pemanfaatan lahan dan pembagian manfaat ekonomi. Pengelolaan sumber daya yang tidak dilakukan secara adil dapat memicu eksploitasi lingkungan dan menurunkan keberlanjutan destinasi wisata. Kondisi tersebut juga berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi dan pendapatan pedagang di kawasan wisata.⁶⁶

⁶⁵ Chevi Ning Suyudi MT ST dkk., *Kota Kediri Menuju Pembangunan Berkelanjutan Pendekatan Multidisipliner* (Greenbook Publisher, 2025).

⁶⁶ Muzakky, "Peran Pengelolaan Objek Wisata Terhadap Penigkatan Pendapatan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam."

Keempat, Partisipasi masyarakat lokal dan perlindungan kepentingan pedagang menjadi bagian penting dalam pengelolaan wisata berkelanjutan. Masyarakat lokal dan pedagang sering menjadi pihak yang paling terdampak oleh aktivitas wisata, tetapi tidak selalu memperoleh manfaat ekonomi secara merata. Keterlibatan masyarakat tidak cukup hanya melalui forum musyawarah, tetapi juga harus mencakup pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan wisata, serta pengawasan dan evaluasi pengelolaan destinasi. Masyarakat lokal dapat dilibatkan dalam pengelolaan kawasan wisata sebagai pemandu wisata, petugas kebersihan, pengelola parkir, maupun pengawas lingkungan. Keterlibatan tersebut membantu menciptakan rasa memiliki terhadap destinasi wisata sehingga masyarakat lebih aktif menjaga keberlanjutan kawasan wisata.

Distribusi manfaat ekonomi wisata perlu dilakukan secara adil agar tidak hanya dinikmati oleh pelaku usaha besar atau investor. Pendapatan wisata juga harus dirasakan oleh pedagang kecil, petani lokal, dan pengrajin yang menjadi bagian dari aktivitas wisata. Perlindungan terhadap pedagang lokal dapat dilakukan melalui penyediaan ruang usaha yang strategis, akses permodalan dengan bunga ringan, serta pengaturan usaha untuk mencegah persaingan yang tidak sehat. Pemerintah dan pengelola destinasi juga perlu memastikan pedagang lokal tetap dilibatkan dalam setiap kegiatan atau event wisata agar tidak tergeser oleh pelaku usaha dari luar daerah. Dukungan wisatawan juga memiliki pengaruh besar terhadap keberlanjutan

pendapatan pedagang melalui kebiasaan membeli produk lokal dan menggunakan jasa masyarakat setempat.⁶⁷

Konflik kepentingan sering muncul dalam pengelolaan wisata, terutama ketika modernisasi kawasan wisata mengancam keberadaan usaha tradisional masyarakat lokal. Penataan kawasan wisata yang terlalu berorientasi pada kepentingan investor dapat mengurangi karakter lokal dan mengancam sumber penghidupan pedagang kecil. Pengelolaan wisata berkelanjutan harus mampu menyeimbangkan antara penataan kawasan dan perlindungan terhadap usaha masyarakat lokal. Revitalisasi kawasan wisata dapat dilakukan tanpa menghilangkan identitas lokal melalui peningkatan kebersihan, keamanan, dan kualitas fasilitas usaha. Destinasi wisata yang berhasil umumnya merupakan destinasi yang melibatkan pedagang dan masyarakat lokal dalam setiap pengambilan keputusan sehingga mereka tidak hanya menjadi pelaku usaha, tetapi juga bagian penting dalam pengelolaan kawasan wisata.⁶⁸

Kelima, Setiap *stakeholder* memiliki peran yang saling berkaitan dalam menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dalam pengelolaan wisata. Pemerintah berperan dalam menyusun kebijakan, pengawasan, dan penyediaan regulasi yang mendukung keberlanjutan wisata. Masyarakat lokal berperan menjaga budaya, lingkungan, dan nilai sosial di kawasan wisata. Pedagang menjadi penggerak ekonomi mikro yang

⁶⁷ Kurniawan dan Iriani, "Dampak Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Marginal di Indonesia."

⁶⁸ Lestari, "Kontribusi Pentahelix Sebagai Stakeholder Dalam Penyebarluasan Informasi Desa Wisata Melung."

mendukung aktivitas wisata melalui penyediaan produk dan layanan bagi wisatawan. Pelaku usaha wisata seperti hotel, restoran, dan biro perjalanan dapat membantu memperluas pemasaran serta menciptakan kerja sama usaha dengan masyarakat lokal.

Pengelola destinasi memiliki tugas sebagai koordinator dalam menjalankan kebijakan teknis, mengatur kegiatan wisata, dan menyelesaikan konflik antar stakeholder. Wisatawan juga memiliki peran penting melalui perilaku konsumsi yang mendukung wisata berkelanjutan, seperti membeli produk lokal, menjaga kebersihan, dan menghormati aturan adat setempat. Investor perlu menjalankan investasi yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat sekitar. Organisasi masyarakat, lembaga lingkungan, dan lembaga pariwisata dapat membantu melakukan pengawasan, penelitian, serta memberikan rekomendasi terhadap pengelolaan wisata.⁶⁹

Keberhasilan wisata berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh koordinasi dan kerja sama seluruh *stakeholder*. Pengelolaan wisata yang berjalan dengan baik mampu meningkatkan pendapatan pedagang tanpa merusak lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat. Konflik kepentingan dapat muncul apabila salah satu pihak lebih dominan dan mengabaikan kepentingan pihak lain, seperti tingginya target kunjungan wisata yang berpotensi merusak lingkungan atau pembangunan wisata yang mengancam ruang usaha masyarakat lokal. Penyelesaian konflik memerlukan

⁶⁹ Safitri, "Peran Pengembangan Objek Wisata Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat."

komunikasi, kerja sama, dan aturan yang disepakati bersama agar pengelolaan wisata tetap berjalan secara adil dan berkelanjutan.

Strategi pengelolaan destinasi wisata pada dasarnya merupakan bentuk kerja sama seluruh stakeholder dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Keberlanjutan pendapatan pedagang tidak dapat tercapai apabila pengelolaan wisata mengabaikan peran masyarakat lokal, merusak lingkungan, atau hanya mengutamakan kepentingan modal besar. Pengelolaan wisata yang berkelanjutan memerlukan keterlibatan seluruh pihak agar manfaat wisata dapat dirasakan secara merata dan mampu bertahan dalam jangka panjang.⁷⁰

5. Strategi Pengembangan Wisata Berbasis Masyarakat

Community-Based Tourism (CBT) atau pariwisata berbasis masyarakat muncul sebagai alternatif dari model pariwisata konvensional yang cenderung eksploitatif. Konsep ini menekankan bahwa masyarakat lokal harus menjadi subjek atau pelaku utama pengembangan pariwisata, bukan sekadar objek atau penerima manfaat pasif. Prinsip-prinsip utama pariwisata berbasis masyarakat yang meliputi pengakuan terhadap hak masyarakat atas sumber daya alam dan budaya di wilayahnya, partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh tahap pengembangan pariwisata mulai dari perencanaan hingga evaluasi, pembagian manfaat yang adil kepada seluruh

⁷⁰ Muzakky, "Peran Pengelolaan Objek Wisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam."

anggota masyarakat, serta pengembangan kapasitas masyarakat untuk mengelola pariwisata secara mandiri. Prinsip-prinsip ini menempatkan masyarakat sebagai pemilik sekaligus pengelola utama aktivitas pariwisata.⁷¹

Implementasi pariwisata berbasis masyarakat di Indonesia menunjukkan hasil yang beragam namun ada beberapa kasus sukses yang dapat dijadikan pembelajaran. Desa Nusa di Aceh Besar menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat yang ditandai dengan partisipasi komunitas dalam pengelolaan sampah, strategi ekonomi, pengelolaan air, dan lingkungan komunitas. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa masyarakat desa memiliki kapasitas untuk mengelola pariwisata secara mandiri jika diberikan kepercayaan dan dukungan yang memadai.⁷²

Contoh lain dapat dilihat pada Desa Wisata Batu Katak di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang berhasil mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat. Pendampingan dari Yayasan Pariwisata Berkelanjutan Indonesia memberikan pelatihan kepada masyarakat, khususnya kelompok perempuan, dalam bidang perhotelan, kuliner, manajemen wisata, serta penggunaan teknologi digital untuk pemasaran. Platform digital

⁷¹ Sana, "Strategi Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan untuk Mengurangi Dampak Lingkungan di Destinasi Wisata Alam Indonesia."

⁷² Zulfi dan Asriati, "Kontribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Nasional Dalam Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan."

visitleuser.com juga dikembangkan untuk membantu pelaku usaha kecil memasarkan produk dan layanan mereka kepada pasar yang lebih luas.⁷³

Contoh pengelolaan berbasis masyarakat pada tingkat lokal dapat ditemukan di Gronjong Wariti. Destinasi wisata tersebut menerapkan sistem pengelolaan berbasis saham dan patungan masyarakat. Seluruh karyawan yang berjumlah sekitar 60 orang serta 45 pedagang berasal dari warga desa setempat. Keceragaman harga makanan diterapkan untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antarpedagang. Model pengelolaan ini menunjukkan bahwa pariwisata desa dapat berkembang tanpa bergantung pada investor besar, melainkan melalui semangat gotong royong dan penerapan sistem yang adil.⁷⁴

Pengelolaan kepariwisataan merupakan faktor kunci yang menentukan sejauh mana pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal termasuk pedagang. Fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian harus dijalankan secara seimbang dalam siklus yang berkelanjutan. Strategi pengelolaan destinasi yang efektif memerlukan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dengan masing-masing peran yang saling melengkapi. Pariwisata berbasis masyarakat menawarkan model alternatif yang lebih inklusif dan berkeadilan, namun

⁷³ Anggia Ramadhan dkk., *Faktor-Faktor Peningkatan Wisatawan Alam Batu Katak Di Desa Batujongjong Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat*, 2, no. 1 (2022): 83–90, <https://doi.org/10.51903/semnastekmu.v2i1.157>.

⁷⁴ Lailatul Fitria Devi, “Peran Desa Wisata Kampung Madu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bringin Kecamatan Badas Kabupaten Kediri,” *Skripsi UIN Syekh Wasil Kediri*, 2025.

implementasinya memerlukan dukungan kebijakan dan penguatan kapasitas yang memadai. Keterkaitan antara pengelolaan wisata dengan pendapatan pedagang sangat erat, karena kebijakan dan strategi pengelolaan secara langsung mempengaruhi volume kunjungan wisatawan, tingkat pengeluaran mereka, serta seberapa besar manfaat ekonomi yang dapat ditangkap oleh pedagang lokal.

C. Konsep Wisata Berkelanjutan

1. Pengertian Wisata Berkelanjutan Menurut Para Ahli

Pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) merupakan konsep pengelolaan wisata yang lahir dari kesadaran bahwa pengembangan pariwisata yang hanya berorientasi pada peningkatan jumlah wisatawan dan keuntungan ekonomi jangka pendek tidak lagi memadai. Model pariwisata konvensional sering menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi, konflik sosial, hingga hilangnya identitas budaya lokal. Konsep ini berakar pada paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang dipopulerkan oleh *World Commission on Environment and Development* melalui laporan Brundtland tahun 1987 yang mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.⁷⁵ Konsep keberlanjutan dalam pariwisata

⁷⁵ Graham Miller dan Anna Torres-Delgado, "Measuring sustainable tourism: a state of the art review of sustainable tourism indicators," *Journal of Sustainable Tourism* 31, no. 7 (2023): 1483–96, <https://doi.org/10.1080/09669582.2023.2213859>.

menekankan bahwa pengembangan wisata tidak hanya bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan agar destinasi wisata tetap dapat bertahan dalam jangka panjang.

United Nations World Tourism Organization (UNWTO) mendefinisikan pariwisata berkelanjutan sebagai pariwisata yang mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini maupun masa depan dengan tetap memperhatikan kebutuhan wisatawan, industri pariwisata, lingkungan, dan masyarakat lokal. Definisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan wisata tidak hanya diukur dari tingginya jumlah kunjungan atau pendapatan wisata, tetapi juga dari kemampuan destinasi dalam menjaga keseimbangan antar aspek keberlanjutan.⁷⁶

UNWTO menekankan tiga pilar utama pariwisata berkelanjutan, yaitu kelayakan ekonomi (*economic viability*), keadilan sosial (*social equity*), dan perlindungan lingkungan (*environmental protection*). Perkembangan kajian pariwisata berkelanjutan kemudian menempatkan budaya sebagai bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan destinasi wisata. Konsep pariwisata berkelanjutan akhirnya berkembang menjadi empat pilar utama, yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Keempat pilar tersebut saling berkaitan dan harus berjalan secara seimbang dalam pengelolaan destinasi wisata.⁷⁷

⁷⁶ Sana, "Strategi Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan untuk Mengurangi Dampak Lingkungan di Destinasi Wisata Alam Indonesia."

⁷⁷ Sana, "Strategi Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan untuk Mengurangi Dampak Lingkungan di Destinasi Wisata Alam Indonesia."

Pilar ekonomi menekankan bahwa kegiatan wisata harus mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Aktivitas wisata tidak hanya ditujukan untuk menghasilkan keuntungan bagi investor atau pelaku usaha besar, tetapi juga harus menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendukung perkembangan usaha kecil di kawasan wisata. Kelayakan ekonomi dalam pariwisata berkelanjutan berkaitan dengan kemampuan destinasi dalam menjaga stabilitas pendapatan wisata tanpa melakukan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam maupun sosial. Distribusi manfaat ekonomi perlu dilakukan secara merata agar pedagang kecil, pelaku UMKM, petani lokal, dan masyarakat sekitar turut memperoleh manfaat dari aktivitas wisata. Keberlanjutan ekonomi bagi pedagang berkaitan dengan tersedianya peluang usaha yang stabil, akses pasar yang luas, serta perlindungan terhadap persaingan usaha yang tidak sehat.⁷⁸

Pilar sosial berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat lokal dan pemerataan manfaat wisata. Pariwisata berkelanjutan harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat tanpa menimbulkan kesenjangan sosial, konflik kepentingan, maupun marginalisasi kelompok tertentu. Masyarakat lokal memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan wisata karena mereka merupakan pihak yang paling terdampak oleh aktivitas pariwisata. Keadilan sosial dalam

⁷⁸ Afifah dkk., “Pengaruh Penerapan Ekonomi Berkelanjutan terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Lokal di Pantai Cemara Kembar.”

pariwisata juga mencakup perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, penggusuran ruang hidup, atau terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya akibat pembangunan fasilitas wisata. Pilar sosial dalam konteks pedagang lokal menekankan pentingnya perlindungan hak usaha, kesempatan yang sama dalam aktivitas ekonomi wisata, dan keterlibatan dalam proses pengelolaan destinasi wisata.

Pilar budaya menekankan pentingnya menjaga identitas budaya dan kearifan lokal dalam pengembangan destinasi wisata. Budaya lokal merupakan daya tarik utama wisata yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat setempat. Pengembangan wisata tidak boleh menghilangkan nilai budaya hanya demi kepentingan komersial atau hiburan semata. Tradisi, kesenian, adat istiadat, kuliner tradisional, dan kerajinan lokal harus tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas kawasan wisata. Masyarakat lokal dan pedagang memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan budaya melalui produk dan layanan yang mencerminkan ciri khas daerah wisata. Keberadaan budaya lokal yang tetap terjaga dapat memperkuat identitas destinasi sekaligus meningkatkan daya tarik wisata dalam jangka panjang.

Pilar lingkungan menjadi dasar penting dalam pariwisata berkelanjutan karena kualitas lingkungan sangat memengaruhi keberlangsungan destinasi wisata. Aktivitas wisata yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, penumpukan

sampah, kerusakan ekosistem, hingga menurunnya kualitas sumber daya alam. Pengelolaan wisata harus memperhatikan daya dukung lingkungan agar eksploitasi sumber daya tetap berada dalam batas yang aman. Upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dapat dilakukan melalui pengelolaan sampah, pengurangan penggunaan plastik, konservasi sumber daya alam, penghijauan kawasan wisata, serta pengawasan terhadap aktivitas wisata yang berpotensi merusak lingkungan. Seluruh *stakeholder*, termasuk pemerintah, masyarakat, pengelola wisata, pedagang, dan wisatawan memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan wisata.⁷⁹

Keempat pilar tersebut tidak dapat dipisahkan karena kelemahan pada satu aspek akan memengaruhi keberlanjutan aspek lainnya. Pengelolaan wisata yang hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan keadilan sosial dapat menimbulkan ketimpangan antara investor besar dan masyarakat lokal. Kondisi tersebut berpotensi memicu konflik sosial yang pada akhirnya menurunkan kualitas destinasi wisata. Perlindungan lingkungan yang tidak memperhatikan kebutuhan ekonomi masyarakat dapat mendorong eksploitasi sumber daya secara ilegal akibat kurangnya alternatif mata pencaharian. Peningkatan aktivitas wisata tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dan budaya lokal juga berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan serta hilangnya identitas budaya kawasan wisata. Pengelolaan wisata berkelanjutan harus

⁷⁹ Safitri, "Peran Pengembangan Objek Wisata Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat."

dilakukan secara seimbang agar manfaat wisata dapat dirasakan dalam jangka panjang oleh seluruh pihak.

Konsep pariwisata berkelanjutan memiliki relevansi yang kuat dalam pengelolaan destinasi wisata di Indonesia. Banyak kawasan wisata mulai menghadapi berbagai permasalahan akibat ketidakseimbangan pengelolaan wisata, seperti pencemaran lingkungan, marginalisasi pedagang lokal, dan ketergantungan ekonomi terhadap wisata musiman. Kawasan wisata yang terlalu berorientasi pada pembangunan besar sering mengabaikan keberadaan masyarakat lokal dan pedagang kecil sehingga manfaat ekonomi tidak terdistribusi secara merata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan pendapatan pedagang tidak hanya dipengaruhi oleh tingginya jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan destinasi wisata secara keseluruhan.

Richard Butler menjelaskan bahwa pariwisata berkelanjutan merupakan pariwisata yang dikembangkan dan dikelola agar mampu bertahan dalam jangka panjang tanpa menyebabkan kerusakan permanen terhadap lingkungan alam maupun sosial budaya. Pandangan Butler menekankan pentingnya menjaga daya tahan destinasi wisata agar tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.⁸⁰ Weaver menjelaskan bahwa keberlanjutan wisata bukanlah kondisi yang dapat dicapai secara sempurna, melainkan proses perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus untuk

⁸⁰ Sintia dan Nurhayati, "Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Daya Saing Destinasi Lokal."

mengurangi dampak negatif dan meningkatkan manfaat positif wisata. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan wisata berkelanjutan memerlukan evaluasi dan penyesuaian yang dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan di kawasan wisata.⁸¹

2. Prinsip-Prinsip Wisata Berkelanjutan

Prinsip-prinsip wisata berkelanjutan merupakan panduan operasional yang menjabarkan nilai-nilai keberlanjutan ke dalam tindakan konkret. UNWTO merumuskan beberapa prinsip utama yang harus menjadi acuan dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan.

Prinsip pertama dalam wisata berkelanjutan adalah penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, yaitu pemanfaatan sumber daya alam, sosial, dan budaya pada tingkat yang tetap memungkinkan proses pembaruan dan pemulihan secara alami. Konteks wisata bahari menunjukkan bahwa pemanfaatan terumbu karang untuk kegiatan snorkeling perlu dibatasi guna mencegah kerusakan ekosistem. Prinsip ini juga berkaitan dengan aktivitas pedagang karena ketersediaan sumber daya lokal menjadi penunjang utama dalam proses produksi barang dagangan.⁸²

Prinsip kedua adalah pengurangan konsumsi berlebihan dan limbah. Destinasi wisata berkelanjutan perlu mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak terbarukan serta meminimalkan produksi limbah melalui

⁸¹ Astuti dkk., *Pariwisata Berkelanjutan Konsep dan Implementasi*.

⁸² Astuti dkk., *Pariwisata Berkelanjutan Konsep dan Implementasi*.

penerapan prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle*. Penerapan prinsip tersebut pada kegiatan perdagangan dapat dilakukan melalui penggunaan kemasan ramah lingkungan dan pengelolaan sampah yang baik. Prinsip ketiga adalah pemeliharaan keanekaragaman hayati dan nilai-nilai lokal. Aktivitas pariwisata tidak boleh mengancam kelestarian flora dan fauna langka maupun merusak situs budaya yang memiliki nilai penting bagi masyarakat setempat. Prinsip ini menuntut pedagang untuk tidak menjual produk yang berasal dari spesies yang dilindungi serta tidak memanfaatkan simbol budaya secara tidak hormat.⁸³

Prinsip keempat adalah keterlibatan masyarakat lokal. Pariwisata berkelanjutan harus memberikan manfaat ekonomi yang signifikan kepada masyarakat lokal, menciptakan lapangan kerja, serta melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Prinsip kelima adalah peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi seluruh pemangku kepentingan tentang pentingnya keberlanjutan. Prinsip keenam adalah tanggung jawab pemasaran yang berarti promosi destinasi harus jujur dan tidak menyesatkan, serta mendistribusikan wisatawan secara merata untuk menghindari *overtourism*.

3. Keterlibatan Masyarakat Lokal dalam Wisata Berkelanjutan

Keterlibatan masyarakat lokal merupakan elemen kunci yang membedakan pariwisata berkelanjutan dari model pariwisata konvensional.

⁸³ Sintia dan Nurhayati, "Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Daya Saing Destinasi Lokal."

Tanpa partisipasi aktif masyarakat, pariwisata berkelanjutan hanyalah slogan kosong. Keterlibatan ini tidak boleh bersifat simbolis tetapi harus substantif, mencakup seluruh tahap siklus pengembangan pariwisata mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring, hingga evaluasi.

Keterlibatan masyarakat lokal dalam pariwisata berkelanjutan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari tingkat sederhana hingga tingkat yang lebih kompleks. Tingkat paling dasar menunjukkan keterlibatan masyarakat sebagai tenaga kerja atau penyedia jasa, seperti pemandu wisata, petugas kebersihan, dan penjaga keamanan. Tingkat yang lebih tinggi memperlihatkan keterlibatan masyarakat sebagai pengelola usaha, seperti penyedia homestay, restoran, dan toko suvenir. Tingkat tertinggi menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis melalui keikutsertaan dalam badan pengelola destinasi maupun forum musyawarah.⁸⁴

Hasil studi di Desa Nusa menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pariwisata berkelanjutan terlihat pada pengelolaan sampah, strategi ekonomi, pengelolaan air, serta pembentukan komunitas lingkungan. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek kebijakan yang dibuat pihak luar, tetapi juga menjadi subjek aktif dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Kondisi tersebut sejalan dengan prinsip

⁸⁴ Azmi Azwar dkk., “(Tanah,Uang Dan Kekuasaan) Pengembangan Pariwisata Dan Pelestarian Gerabah Di Desa Wisata Banyumulek Lombok Barat,” *Journal Of Responsible Tourism* 4, no. 2 (2024): 573–80, <https://doi.org/10.47492/jrt.v4i2.3685>.

Community-Based Tourism yang menempatkan masyarakat sebagai pemilik sekaligus pengelola utama kegiatan pariwisata.⁸⁵

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata dapat dilihat pada Gronjong Wariti yang seluruh sistem pengelolaannya dijalankan oleh warga desa setempat. Petugas loket, penjaga wahana, bagian keamanan, hingga pedagang kaki lima berasal dari masyarakat lokal. Sistem saham dan patungan yang diterapkan memberikan kesempatan kepada warga untuk memiliki bagian dalam usaha wisata tersebut. Penerapan sistem tersebut menciptakan rasa memiliki yang kuat sehingga masyarakat terdorong untuk menjaga dan mengembangkan destinasi wisata secara bersama-sama.

4. Pengembangan Wisata yang Ramah Lingkungan dan Berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat

Pengembangan wisata berkelanjutan harus menyeimbangkan dua tujuan yang tampak kontradiktif namun sebenarnya saling melengkapi yakni ramah lingkungan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kedua tujuan ini tidak dapat dicapai secara terpisah karena kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang hanya mungkin terwujud jika lingkungan tempat mereka hidup dan bekerja tetap lestari. Pengembangan wisata ramah lingkungan (*green tourism* atau *ecotourism*) menekankan pada minimalisasi dampak negatif terhadap alam melalui berbagai praktik seperti pengurangan emisi karbon, efisiensi energi dan air, pengelolaan

⁸⁵ Indonesia, "Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Provinsi Asal - Tabel Statistik."

limbah yang bertanggung jawab, serta perlindungan keanekaragaman hayati. Pengembangan wisata jenis ini biasanya ditujukan untuk wisatawan yang memiliki kesadaran lingkungan tinggi dan bersedia membayar lebih untuk pengalaman wisata yang bertanggung jawab.

Pengembangan wisata yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (*pro-poor tourism* atau *community-based tourism*) menekankan pada distribusi manfaat ekonomi yang adil, penciptaan lapangan kerja, pengembangan kapasitas, serta peningkatan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi. Model ini biasanya diterapkan di daerah pedesaan yang memiliki potensi wisata namun masyarakatnya masih tergolong miskin. Integrasi antara pendekatan ramah lingkungan dan berorientasi kesejahteraan masyarakat tercermin dalam praktik-praktik seperti pengembangan *homestay* yang menggunakan energi surya, pengolahan sampah organik menjadi kompos yang kemudian digunakan untuk pertanian organik yang hasilnya dijual kepada wisatawan, serta pemanfaatan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.

5. Hubungan Wisata Berkelanjutan dengan Kesejahteraan Pedagang Lokal

Hubungan antara pariwisata berkelanjutan dan kesejahteraan pedagang lokal bersifat multidimensional serta saling memengaruhi. Pertama, pariwisata berkelanjutan mampu menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan pendapatan pedagang melalui peningkatan kualitas destinasi, kestabilan jumlah kunjungan wisatawan, serta meningkatnya kesediaan wisatawan untuk membelanjakan uangnya di

kawasan wisata. Kesejahteraan pedagang juga menjadi indikator keberhasilan penerapan pariwisata berkelanjutan karena pilar ekonomi dalam konsep keberlanjutan menekankan pentingnya distribusi manfaat yang adil bagi masyarakat lokal.

Pariwisata berkelanjutan berkontribusi terhadap kesejahteraan pedagang melalui beberapa mekanisme penting. Mekanisme pertama terlihat pada kemampuan pariwisata berkelanjutan dalam menjaga daya tarik destinasi untuk jangka panjang sehingga wisatawan tetap tertarik berkunjung. Destinasi wisata yang tidak dikelola secara berkelanjutan berisiko mengalami penurunan kualitas akibat kerusakan lingkungan maupun mudarnya nilai budaya lokal. Kondisi tersebut dapat menurunkan jumlah wisatawan dan berdampak langsung pada pendapatan pedagang.

Kedua, pariwisata berkelanjutan cenderung menarik wisatawan yang memiliki kualitas lebih tinggi dari segi pengeluaran per kunjungan (*higher spending tourists*) dibandingkan pariwisata massal. Wisatawan yang peduli terhadap keberlanjutan biasanya bersedia membayar lebih untuk produk yang ramah lingkungan dan otentik, termasuk makanan dan suvenir yang dibeli dari pedagang lokal. Kondisi ini dapat meningkatkan margin keuntungan pedagang. Ketiga, pariwisata berkelanjutan mendorong keterlibatan pedagang lokal dalam rantai nilai pariwisata melalui kebijakan yang memprioritaskan penyediaan barang dan jasa dari sumber lokal.

Kebijakan ini melindungi pedagang dari persaingan tidak sehat dengan pedagang dari luar daerah yang mungkin memiliki modal lebih besar.⁸⁶

Pariwisata berkelanjutan merupakan paradigma yang menempatkan keseimbangan antara pilar ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan sebagai dasar pengembangan destinasi. Konsep yang dikembangkan oleh Richard Butler tentang siklus hidup kawasan wisata serta pentingnya daya dukung menjadi landasan teoritis yang kuat untuk memahami dinamika destinasi dan titik-titik kritis yang memerlukan intervensi strategis. Prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan memberikan panduan operasional yang dapat diimplementasikan oleh pengelola destinasi termasuk dalam upaya meningkatkan pendapatan pedagang lokal. Keterlibatan masyarakat lokal merupakan elemen kunci yang membedakan pariwisata berkelanjutan dari model konvensional, dan tingkat keterlibatan ini berkorelasi positif dengan tingkat kesejahteraan pedagang. Hubungan antara wisata berkelanjutan dan kesejahteraan pedagang bersifat dialektis di mana keberhasilan pencapaian salah satu aspek akan mendukung pencapaian aspek lainnya. Relevansi teori ini dengan kondisi wisata lokal di Indonesia sangat tinggi mengingat banyak destinasi wisata yang saat ini berada pada titik kritis antara keberlanjutan dan penurunan akibat eksploitasi berlebihan.

⁸⁶ Astuti dkk., *Pariwisata Berkelanjutan Konsep dan Implementasi*.

D. Pendapatan Masyarakat Sekitar Wisata

1. Pengertian Pendapatan Menurut Para Ahli Ekonomi

Pendapatan merupakan konsep sentral dalam ilmu ekonomi yang merujuk pada aliran uang atau nilai ekonomi lainnya yang diterima oleh individu atau rumah tangga dari berbagai aktivitas ekonomi selama periode waktu tertentu. Samuelson dan Nordhaus mendefinisikan pendapatan sebagai jumlah uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga dari berbagai sumber seperti upah kerja, keuntungan usaha, bunga modal, sewa properti, serta transfer payment, dalam periode waktu tertentu biasanya satu tahun.⁸⁷

Pendapatan dapat dibedakan menjadi pendapatan kotor (*gross income*) dan pendapatan bersih (*net income*). Pendapatan kotor merupakan total penerimaan sebelum dikurangi berbagai biaya, sedangkan pendapatan bersih merupakan sisa penerimaan setelah dikurangi biaya produksi maupun biaya operasional. Perbedaan antara pendapatan kotor dan pendapatan bersih menjadi hal penting bagi pedagang karena pendapatan bersih menunjukkan keuntungan nyata yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pendapatan tidak hanya mencakup penerimaan dalam bentuk uang, tetapi juga nilai dari barang dan jasa yang diproduksi untuk dikonsumsi sendiri (*subsistence income*). Kondisi ini umumnya ditemukan pada masyarakat pedesaan yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan ekonomi

⁸⁷ Maria Anita Titu dkk., *Pengantar Ilmu Ekonomi* (CV. Intelektual Manifes Media, 2023).

pasar. Pedagang di destinasi wisata menjadikan pendapatan moneter dari aktivitas berdagang sebagai sumber utama penghidupan, namun mereka juga dapat memperoleh manfaat nonmoneter seperti akses terhadap informasi, jaringan sosial, dan peningkatan status sosial.⁸⁸

Pendapatan merupakan determinan utama dari tingkat konsumsi dan tabungan. Teori konsumsi Keynes menyatakan bahwa pendapatan *disposabel* (pendapatan setelah pajak) adalah faktor paling penting yang menentukan pengeluaran konsumsi. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi pula tingkat konsumsinya, meskipun proporsi pendapatan yang dikonsumsi (*marginal propensity to consume*) cenderung menurun seiring peningkatan pendapatan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Masyarakat

Pendapatan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan secara kompleks. Faktor-faktor tersebut meliputi tingkat pendidikan dan keterampilan, kepemilikan modal, akses terhadap teknologi, kondisi pasar tenaga kerja, serta kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan upah dan perpajakan. Konteks masyarakat di sekitar destinasi wisata menunjukkan adanya faktor tambahan yang turut memengaruhi tingkat pendapatan masyarakat.⁸⁹

⁸⁸ Titu dkk., *Pengantar Ilmu Ekonomi*.

⁸⁹ Afif Hidayatullah dan Sri Muljaningsih, "Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang," *Journal of Development Economic and Social Studies* 2, no. 4 (2023): 867–82, <https://doi.org/10.21776/jdess.2023.02.4.13>.

Pengaruh negatif lokasi terhadap pendapatan menjadi temuan yang menarik untuk diperhatikan karena secara umum lokasi yang strategis seharusnya memberikan peluang pendapatan yang lebih tinggi bagi pedagang. Kondisi tersebut dapat terjadi karena lokasi yang paling strategis biasanya memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi sehingga keuntungan dari akses yang baik menjadi berkurang akibat persaingan harga antar pedagang. Faktor modal usaha terbukti menjadi faktor paling dominan dalam memengaruhi pendapatan pedagang, sehingga keterbatasan akses permodalan dapat menjadi hambatan utama dalam peningkatan pendapatan.

Tingkat kunjungan wisatawan juga menjadi faktor penting dalam memengaruhi pendapatan pedagang. Jumlah wisatawan yang semakin banyak akan meningkatkan peluang terjadinya transaksi perdagangan. Hubungan tersebut tidak selalu bersifat linear karena jumlah wisatawan yang terlalu berlebihan dapat menimbulkan kemacetan, ketidaknyamanan, serta penurunan kualitas pengalaman wisatawan yang pada akhirnya mengurangi minat wisatawan untuk berbelanja. Faktor musim atau seasonality turut memengaruhi kondisi tersebut karena jumlah wisatawan biasanya mengalami perbedaan yang cukup signifikan antara musim liburan dan musim sepi.

3. Pendapatan Pedagang dalam Sektor Wisata

Pedagang di sektor wisata merupakan bagian dari ekonomi informal yang memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari pedagang

di sektor lain. Karakteristik tersebut antara lain jam kerja yang fleksibel dan sangat dipengaruhi oleh musim wisata, modal usaha yang relatif kecil, jenis dagangan yang spesifik terkait dengan kebutuhan wisatawan, serta tingkat persaingan yang tinggi terutama di lokasi-lokasi strategis.⁹⁰ Pendapatan pedagang di sektor pariwisata cenderung bersifat fluktuatif karena sangat bergantung pada jumlah kunjungan wisatawan. Musim liburan dan akhir pekan biasanya menyebabkan peningkatan pendapatan yang cukup signifikan, sedangkan hari biasa atau musim hujan sering kali mengakibatkan penurunan pendapatan. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian ekonomi yang dapat menyulitkan pedagang dalam merencanakan pengeluaran maupun tabungan untuk jangka panjang.

Jenis barang yang dijual oleh pedagang di sektor wisata sangat beragam mulai dari makanan dan minuman, pakaian dan aksesoris, kerajinan tangan, souvenir, hingga jasa seperti foto dan pijat. Masing-masing jenis dagangan memiliki karakteristik margin keuntungan, daya tahan produk, serta ketergantungan terhadap wisatawan yang berbeda. Makanan dan minuman cenderung memiliki margin keuntungan yang lebih rendah tetapi permintaannya lebih stabil, sementara kerajinan tangan memiliki margin lebih tinggi tetapi sangat tergantung pada selera wisatawan yang berubah-ubah.

⁹⁰ Hidayatullah dan Muljaningsih, "Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang."

4. Pengaruh Aktivitas Wisata terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Aktivitas wisata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat melalui berbagai mekanisme transmisi. Pengaruh ini tidak hanya dirasakan oleh mereka yang secara langsung terlibat dalam industri pariwisata seperti pemandu wisata, staf hotel, dan pegawai restoran, tetapi juga oleh masyarakat luas yang terhubung dengan sektor pariwisata melalui rantai pasok.

Efek langsung (*direct effect*) dari aktivitas wisata terhadap ekonomi masyarakat terjadi ketika wisatawan membelanjakan uangnya untuk membeli barang dan jasa dari pelaku usaha pariwisata. Setiap transaksi yang terjadi antara wisatawan dan pedagang merupakan transfer pendapatan dari wisatawan ke masyarakat lokal. Semakin banyak wisatawan yang berkunjung dan semakin tinggi pengeluaran rata-rata per wisatawan, semakin besar transfer pendapatan yang terjadi.⁹¹

Efek tidak langsung (*indirect effect*) terjadi ketika pelaku usaha pariwisata membelanjakan kembali pendapatan yang mereka terima dari wisatawan untuk membeli barang dan jasa dari pemasok lokal. Seorang pedagang makanan misalnya, akan membeli bahan baku dari petani lokal, membeli gas dari penjual gas lokal, dan membayar jasa pengangkutan sampah kepada warga lokal. Setiap putaran pengeluaran ini menciptakan pendapatan baru bagi pihak lain. Efek induksi (*induced effect*) terjadi ketika

⁹¹ Fairuuz dkk., “Peranan Jumlah Wisatawan Asing, Nilai Tukar, dan PMDN dalam Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Devisa Pariwisata Indonesia.”

penerima pendapatan dari efek langsung dan efek tidak langsung membelanjakan pendapatan mereka untuk konsumsi pribadi seperti membeli makanan, pakaian, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Efek induksi ini menunjukkan bagaimana pariwisata dapat menggerakkan perekonomian secara lebih luas melampaui sektor pariwisata itu sendiri.

5. Hubungan Antara Jumlah Wisatawan dan Pendapatan Pedagang

Hubungan antara jumlah wisatawan dan pendapatan pedagang secara teoritis bersifat positif, tetapi tidak selalu berjalan secara linear. Peningkatan jumlah wisatawan pada tahap awal umumnya akan diikuti oleh peningkatan pendapatan pedagang secara proporsional. Kondisi berbeda dapat terjadi setelah jumlah wisatawan melewati batas tertentu karena peningkatan kunjungan justru berpotensi menurunkan pendapatan pedagang akibat berbagai faktor yang muncul. Titik optimal (*optimal carrying capacity*) dalam konteks pendapatan pedagang menunjukkan tingkat kunjungan wisatawan ketika pendapatan total pedagang mencapai kondisi paling maksimal. Jumlah wisatawan yang masih berada di bawah titik optimal menunjukkan bahwa kapasitas destinasi belum dimanfaatkan sepenuhnya sehingga penambahan wisatawan masih dapat meningkatkan pendapatan pedagang. Jumlah wisatawan yang melebihi titik optimal justru dapat menurunkan pendapatan karena persaingan antar pedagang menjadi lebih ketat, kepadatan kawasan mengurangi kenyamanan wisatawan saat berbelanja, serta kualitas produk dan pelayanan berpotensi menurun akibat

pedagang harus melayani terlalu banyak pelanggan dalam waktu bersamaan.⁹²

Fluktuasi musiman jumlah wisatawan juga menimbulkan ketidakpastian pendapatan bagi pedagang. Musim liburan biasanya memberikan peningkatan pendapatan yang sangat tinggi dibandingkan hari biasa, sedangkan musim sepi dapat menyebabkan pedagang tidak memperoleh pendapatan yang memadai. Kondisi tersebut menyulitkan pedagang dalam mengatur keuangan rumah tangga maupun merencanakan investasi untuk pengembangan usaha.

6. Dampak Wisata terhadap Kesejahteraan Masyarakat Lokal

Kesejahteraan masyarakat lokal merupakan konsep yang tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga mencakup aspek kesehatan, pendidikan, perumahan, serta rasa aman dan kebahagiaan. Pariwisata dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat lokal melalui berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Dampak positif pariwisata terutama terlihat pada peningkatan pendapatan masyarakat yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, serta akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik. Pembangunan infrastruktur pariwisata seperti jalan, listrik, dan air bersih juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara umum.

⁹² Zulfi dan Asriati, "Kontribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Nasional Dalam Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan."

Dampak positif lainnya adalah meningkatnya rasa bangga masyarakat terhadap budaya dan lingkungan tempat tinggalnya. Ketika wisatawan datang karena tertarik dengan keunikan budaya lokal atau keindahan alam setempat, masyarakat lokal merasa dihargai dan termotivasi untuk melestarikan warisan budayanya. Interaksi dengan wisatawan juga membuka wawasan masyarakat dan meningkatkan keterampilan komunikasi serta bahasa asing. Pariwisata tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya biaya hidup akibat inflasi yang dipicu oleh pariwisata (*tourism inflation*) dapat membuat masyarakat lokal kesulitan membeli kebutuhan sehari-hari. Harga tanah dan properti yang melonjak dapat mendorong masyarakat lokal keluar dari wilayahnya (*displacement*). Perubahan gaya hidup yang mengikuti perilaku wisatawan juga dapat menggerus nilai-nilai tradisional masyarakat.⁹³

7. Ketergantungan Ekonomi Masyarakat terhadap Sektor Wisata

Ketergantungan ekonomi terhadap sektor wisata merupakan fenomena yang umum terjadi di destinasi wisata yang sukses. Masyarakat yang sebelumnya memiliki basis ekonomi yang beragam secara perlahan beralih menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata karena dianggap lebih menguntungkan dibandingkan sektor lain. Fenomena ini memiliki implikasi positif dan negatif. Dampak positif dari ketergantungan terhadap sektor wisata menandakan bahwa pariwisata telah berhasil menjadi motor

⁹³ Astuti dkk., *Pariwisata Berkelanjutan Konsep dan Implementasi*.

penggerak ekonomi lokal yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pedagang yang sebelumnya mungkin bekerja sebagai petani atau buruh dengan pendapatan rendah dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui aktivitas berdagang di destinasi wisata.

Ketergantungan yang berlebihan terhadap sektor wisata juga menimbulkan dampak negatif karena membuat masyarakat sangat rentan terhadap berbagai guncangan yang memengaruhi sektor pariwisata. Pandemi COVID-19 menjadi contoh nyata mengenai rapuhnya kondisi ekonomi yang terlalu bergantung pada satu sektor. Pembatasan perjalanan yang diberlakukan selama pandemi menyebabkan destinasi wisata kehilangan pengunjung sehingga masyarakat yang menggantungkan pendapatannya pada sektor pariwisata mengalami penurunan pendapatan secara drastis.⁹⁴ Ketergantungan ekonomi terhadap wisata juga menciptakan kerentanan terhadap faktor-faktor eksternal lainnya seperti perubahan iklim yang dapat merusak daya tarik wisata alam, bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami, serta perubahan kebijakan politik dan keamanan. Wisatawan yang memiliki mobilitas tinggi akan dengan cepat beralih ke destinasi lain jika terjadi ketidakstabilan atau risiko keamanan di suatu destinasi.

⁹⁴ Hidayatullah dan Muljaningsih, "Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang."

Pendapatan merupakan konsep sentral dalam analisis ekonomi yang merujuk pada aliran nilai ekonomi yang diterima individu dari berbagai aktivitas. Pendapatan pedagang di sektor wisata dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti modal usaha, jam kerja, lokasi, jenis dagangan, serta jumlah kunjungan wisatawan. Pengaruh aktivitas wisata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dapat melalui efek langsung, tidak langsung, dan induksi, namun besaran pengaruh ini sangat tergantung pada tingkat keterkaitan sektor pariwisata dengan perekonomian lokal.

Hubungan antara jumlah wisatawan dan pendapatan pedagang bersifat positif namun tidak linear, dengan titik optimal di mana penambahan wisatawan mulai menurunkan pendapatan karena persaingan dan kepadatan. Dampak wisata terhadap kesejahteraan masyarakat lokal bersifat multidimensional, mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya dan psikologis, baik positif maupun negatif. Ketergantungan ekonomi terhadap sektor wisata merupakan konsekuensi yang hampir tak terhindarkan dari kesuksesan pariwisata, namun perlu dikelola secara bijaksana untuk mengurangi kerentanan terhadap guncangan eksternal. Teori ekonomi masyarakat yang relevan dengan penelitian ini menekankan pentingnya distribusi manfaat yang adil, diversifikasi sumber pendapatan, serta penguatan kapasitas masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan.⁹⁵

⁹⁵ Astuti dkk., *Pariwisata Berkelanjutan Konsep dan Implementasi*.